

**GEOGRAFI, GEOPOLITIK, DAN GLOBALISASI:
SUATU ANALISA TERHADAP TEORI SISTEM DUNIA IMMANUEL WALLERSTEIN**

Mohammad Maiwan
Dosen Jurusan PKn FIS UNJ
Email : mmaiwan@yahoo.com

ABSTRACT

World systems theory emerged in the 1970s trying to understand the failure of development in developing countries. This theory is based on the teachings of neo-Marxist and "Annales". According to this theory, the world is driven by a single system, namely, the capitalist system. Regions of the world can be divided into three parts: Center, developed and dominant; Semi-periphery; and Periphery, dependent and underdeveloped. The relationship between the area "center" and "periphery" patterned exploitative, that marked the surplus flow to the countries of the "center". These systems form through a long transformation marked by the process of annexation (incorporation), colonization, agrarian commercialization, industrialization and proletarianization, as well as the dissemination of ideas of liberalism. The existence of capitalist system increasingly with the process of globalization.

Keywords: The world system, development, socio-economic changes.

PENGANTAR

Teori-teori pembangunan pembahasan tentang aspek-aspek perubahan sosial ekonomi senantiasa diwarnai dengan perdebatan panjang yang melahirkan berbagai argumen, yang sampai hari ini tetap menjadi wacana akademik yang menarik. Ada beberapa teori pembangunan utama yang kita kenal selama ini, yakni, teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Meskipun proses pembangunan di berbagai negara dewasa ini telah berjalan begitu pesat dan melahirkan sejumlah perubahan penting, serta melalui satu konjungtur baru yang sukar ditebak, di bawah bayang-bayang ketidakmenentuan akibat krisis ekonomi yang selalu berulang, namun transformasi perubahan akibat pembangunan itu ada di mana-mana. Terdapat berbagai pergeseran penting, di mana sebagian wilayah-wilayah dunia mengalami pembangunan dan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara sebagian yang lain justru mengalami stagnasi ataupun bahkan kemerosotan ekonomi.

Dalam kaitan ini, para teoritis pembangunan secara terus menerus ditantang untuk menguji kemampuan pandangan-pandangannya agar tidak kehilangan relevansi dalam menganalisis faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pembangunan. Munculnya teori-teori pembangunan beberapa dekade lalu membantu memberikan pemahaman terhadap kegagalan pembangunan di sejumlah negara serta cara-cara mengatasinya. Wacana dan perdebatan tentang pembangunan masing-masing teori berusaha mencoba merumuskan dalil-dalil dan analisisnya untuk memecahkan persoalan. Salah satu teori pembangunan yang menarik untuk dibicarakan adalah teori sistem dunia. Analisa terhadap perubahan sosial ekonomi maupun politik secara global yang disampaikan aliran ini secara teoritik memiliki dimensi geografis dan geopolitik yang amat kental serta membawa konsekwensi-konsekwensi terhadap globalisasi. Untuk itu, artikel di bawah ini akan membicarakan teori sistem dunia serta pandangan-pandangannya dalam konteks geopolitik dunia.

PEMBAHASAN

Teori Sistem Dunia atau seringkali disebut sebagai Sistem Dunia Modern (*Modern World System*) merupakan satu teori pembangunan yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein. Teori ini muncul pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan teori modernisasi maupun teori ketergantungan (*dependensia*) yang telah muncul sebelumnya, yang dianggap gagal dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan ataupun kemiskinan di negara-negara berkembang. Menurut para teoritis sistem dunia, teori ketergantungan hanya bisa menjelaskan gejala terjadinya keterbelakangan saja, tetapi tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di negara berkembang secara memuaskan (Arief Budiman 2000: 107). Melalui tulisan-tulisan yang disampaikannya sepanjang tahun 1970-an, Wallerstein melihat kegagalan pembangunan di negara-negara berkembang dalam kerangka yang lebih menyeluruh sebagai bagian dari mekanisme kerja sistem ekonomi dunia kapitalis yang sudah tertanam kuat.

Teori sistem dunia menjadikan dunia sebagai satu unit analisis dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan dan perubahan sosial. Pemahaman dunia sebagai satu unit analisa dilandasi oleh keyakinan bahwa hanya sistem itulah yang menyejarah (*historical system*), yakni yang pernah wujud, berkembang, dan akan terus berkembang ataupun mati dalam peradaban umat manusia. Karena itu Wallerstein menolak penggunaan masyarakat atau negara sebagai unit analisis karena dianggap tidak cukup memadai untuk memahami karakter perubahan secara global. Menurut beliau, sebelum muncul sistem dunia, ada tiga jenis sistem yang telah muncul dalam sejarah kehidupan umat manusia. Pertama adalah sistem mini (*the mini systems*). Kedua, sistem kekaisaran dunia (*the world empires*), dan ketiga, sistem ekonomi dunia (*the world economies*).

Sistem mini berbentuk kerajaan-kerajaan kecil ataupun model pemerintahan lainnya yang memiliki otoritas di wilayah masing-masing. Namun unit-unit politik tersebut terpisah-pisah dan nyaris tidak ada hubungan satu sama lain. Sistem ini kemudian berubah melalui proses peperangan, invasi, pencaplokan, maupun penggabungan-penggabungan yang melahirkan kerajaan-kerajaan besar dengan wilayah yang sangat luas yang dikenal sebagai imperium dunia (*world empire*). Model kekuasaan imperium dunia dilakukan secara terpusat, di mana raja atau kaisar mengendalikan kekuasaannya sesuai dengan jangkauan kemampuan militernya. Karena luasnya wilayah imperium, maka kontrol kekuasaan untuk daerah-daerah yang jauh akan lebih longgar. Dengan kata lain, pengaruh pemerintah pusat akan semakin lemah. Daerah-daerah hanya dikenakan upeti sebagai tanda takluk.

Wallerstein membedakan antara “sistem dunia” dan “kekaisaran dunia”. Menurut pandangan beliau, sistem dunia (yang tidak perlu mencakup seluruh bumi namun memiliki dimensi-dimensi global) adalah “satu unit dengan sebuah pembagian tenaga kerja tunggal dan sistem-sistem budaya majemuk.” Dengan kata lain, sistem dunia tidaklah perlu mencakup seluruh dunia tetapi mengintegrasikan banyak unit politik dan kultural yang perilaku dan interaksinya dipandu oleh seperangkat aturan sistemis dan norma-norma kultural yang disebut sebagai geokultur. Sementara kekaisaran dunia adalah sebuah unit struktur politik tunggal, di mana kewenangan politik pusat menyandarkan diri pada sistem ekonomi, mengekstraksi dan mendistribusikan sumber-sumber daya untuk kelangsungan dan perkembangan sistem tersebut. Dalam ekonomi dunia, meski tidak ada otoritas politik tunggal, namun ada struktur ekonomi dominan yang memadu interaksi negara-negara dan menciptakan sistem produksi terintegrasi yang menghasilkan pembagian kerja berdasarkan kapasitas industri. Meskipun dewasa ini ada banyak sistem negara yang dimiliki pada kenyataannya hanya ada satu sistem dunia yang dominan, yakni sistem kapitalisme.

Sumber pijakan dari teori sistem dunia adalah ajaran-ajaran neo-Marxis serta mazhab “Annales” dalam bidang sejarah yang dikembangkan oleh Fernand Braudel di Perancis. Pandangan neo-Marxis khususnya diserap dari pendapat dan kritik-kritik kalangan teoritis *dependensia*, yang kemudian diperbarui dalam analisisnya terhadap fenomena pembangunan. Mereka seperti: Paul Baran, Andre Gunder Frank,

Fernando Henrique Cardoso, Theotoni Dos Santos, Samir Amin, dan lain-lain. Sementara dari mazhab Annales, Wallerstein meminjam kerangka analisis sejarah dalam memahami akar-akar dan proses perubahan jangka panjang yang ditimbulkan dalam peristiwa sejarah. Bagaimana kompleksitas perubahan-perubahan sosial itu berlaku dan bagaimana kaitannya dalam kehidupan manusia di wilayah tertentu. Dalam konteks ini, Wallerstein ingin memastikan bahwa proses-proses perubahan yang terjadi dianalisis dalam kerangka jangka panjang yang dianggap cukup untuk mawadahi “perhitungan logis”.

Namun demikian, secara provokatif Wallerstein sendiri menyatakan perspektif sistem dunia modern yang disampaikannya bukanlah merupakan teori, melainkan suatu protes melawan kecenderungan terbentuknya pemahaman ilmu sosial yang keliru sejak dari lahirnya pada pertengahan abad 19 (Wallerstein 1987: 309). Ilmu sosial dalam pandangan beliau bukanlah semata-mata diarahkan untuk sekedar memahami dan menganalisis gejala dalam masyarakat, tetapi juga ikut mengarahkan dan mempengaruhi perubahan. Tugas utama ilmuwan sosial adalah ikut serta secara progresif mengkampanyekan penentangan terhadap dominasi ide-ide maupun praktek penindasan yang berlangsung secara sistemik, dengan mengembangkan satu kesadaran kritikal baru ataupun aksi-aksi kolektif dalam masyarakat. Dalam pandangan Robert dan Jean Gilpin (2002: 328-330) teori sistem dunia merupakan suatu serangan terhadap kapitalisme lanjut. Teori ini merupakan upaya menyediakan alat-alat teoritis yang dengan cara-cara itu negara-negara berkembang dapat mempertahankan kepentingannya dari serangan kapitalisme yang mengglobal.

Pandangan Teori Sistem Dunia

Tesis utama teori sistem dunia modern menyatakan bahwa dunia modern hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu *division of labor* tunggal dan sistem budaya jamak yang membentuk suatu hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah berhenti. Secara hierarkis wilayah dunia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni: Wilayah “pusat” (*center*) yang maju dan dominan; “semi pinggiran” (*semi periphery*) yang setengah maju, dan “pinggiran” (*periphery*) yang tergantung dan terbelakang (Wallerstein 1974: 66-94). Keberadaan dan status masing-masing wilayah menggambarkan derajat penetrasi kekuatan kapitalis. Secara ekonomi maupun politik, wilayah “pusat” yang metropolis menciptakan keterbelakangan di wilayah-wilayah “pinggiran”. Hubungan antara “pusat” dan “pinggiran” bercorak eksploitatif, yang ditandai adanya aliran surplus ke negara-negara “pusat”. Dengan kata lain, kemajuan yang dicapai di wilayah-wilayah pusat secara bersamaan justru menciptakan kemiskinan serta ketimpangan di negara-negara pinggiran. Negara-negara pinggiran terjebak dalam siklus atau pusaran keterbelakangan. Adanya hierarki tersebut menunjukkan wujudnya tingkat kemampuan masing-masing negara yang berbeda-beda.

Dalam pandangan Wallerstein, wilayah pusat adalah negara-negara atau kota-kota utama dunia yang selama ini menjadi pusat-pusat bisnis, keuangan, teknologi, dan perdagangan internasional, yang mengendalikan seluruh rangkaian denyut perekonomian yang berlandaskan sistem kapitalis. Kota-kota metropolis itu seperti: Washington, New York (USA), London (Inggris), Paris (Perancis), Berlin (Jerman), Tokyo (Jepang), Brussel (Belgia), Amsterdam (Belanda) serta negara-negara Eropa Barat maju lainnya. Wilayah-wilayah ini menjadi penyangga sekaligus simbol tegaknya sistem kapitalis global, yang mendominasi sebagian besar aktivitas perdagangan dunia. Negara-negara pusat ini merupakan aktor utama yang menggerakkan perubahan-perubahan dunia, termasuk menentukan nasib negara-negara yang sedang membangun.

Di luar kelompok negara-negara atau wilayah pusat tersebut terdapat wilayah semi pinggiran, dan juga wilayah pinggiran (*periphery*). Negara semi pinggiran adalah negara-negara yang sudah memiliki tingkat kemajuan lumayan dibandingkan dengan negara-negara pinggiran. Wilayah ini sudah mampu mengembangkan industri yang cukup kuat dan maju, yang ditopang oleh aktivitas perdagangan dan keuangan yang memadai serta institusi-institusi ekonomi yang mapan. Namun demikian, negara semi

pinggiran belum bisa melepaskan sepenuhnya ketergantungannya dari negara-negara maju, apalagi menyamainya. Menurut Muir (2012: 231) kehadiran negara-negara semi pinggiran sesungguhnya diperlukan untuk membawa stabilitas dan perimbangan dalam mencegah eksploitasi yang berlebihan negara-negara pusat kepada negara-negara pinggiran, di mana negara-negara semi pinggiran dapat menjadi bemp (penahan) eksploitasi tersebut dengan membangun aliansi dengan negara-negara pinggiran. Dalam konteks ini, negara-negara semi pinggiran memiliki posisi penting dalam mendinamisasikan keadaan dengan bertindak sebagai inkubator perubahan.

Sementara wilayah pinggiran adalah negara-negara yang memiliki status ekonomi terbelakang, memiliki tingkat kemiskinan yang cukup besar, kualitas sumberdaya manusia yang rendah, tata pemerintahan yang buruk serta tatanan sosial yang rapuh. Negara-negara ini merupakan pemasok bahan mentah untuk keperluan industri, sekaligus tempat pemasaran produk-produk industri negara-negara maju. Dalam mata rantai perdagangan ekonomi dunia, negara-negara pinggiran senantiasa bergantung kepada negara-negara maju, dan mereka tidak bisa lepas dari sistem yang ada. Alih-alih negara-negara pinggiran bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, mereka justru makin larut dalam sistem tersebut dan ikut memperdalam pengaruh sistem ekonomi kapitalis di wilayahnya (Wallerstein 1984: 33-45).

Menurut teori sistem dunia, ekonomi internasional merupakan arena pertarungan kepentingan antara negara-negara pusat yang maju dengan negara-negara pinggiran yang lemah dan terbelakang, dalam wujud penghisapan, yang menyebabkan negara-negara terbelakang terhalang kemajuannya baik secara ekonomi maupun politik. Pembagian kerja internasional secara langgeng telah menempatkan negara-negara pinggiran selalu pada posisi tergantung kepada negara-negara maju. Melalui kemampuan ekonomi, jenis produksi, teknologi dan strategi perdagangan yang diciptakan sedemikian rupa, negara-negara pusat (maju) menikmati aliran surplus perdagangan yang secara bersamaan memiskinkan negara-negara pinggiran. Dengan demikian, fenomena pembangunan dan keterbelakangan dalam perspektif sistem dunia tidak lain merupakan sisi yang berbeda dari mata uang yang sama.

Kewujudan negara-negara pusat, semi pinggiran, dan pinggiran serta corak hubungan antara ketiganya telah melahirkan terbentuknya gugus-gugus wilayah maju dengan pengaruh ekonomi dan politik di satu sisi, sementara pada sisi lain ada negara-negara atau wilayah semi pinggiran yang meskipun sudah mencapai tahap kemajuan signifikan dan tertransformasi menjadi kekuatan baru, namun kedudukannya tetaplah bergantung pada wilayah pusat. Selain itu, ada gugus wilayah negara-negara pinggiran yang secara ekonomi hampir sepenuhnya tergantung pada wilayah pusat maupun semi pinggiran. Negara-negara ini merupakan gugus kawasan negara-negara miskin dan terbelakang. Pembagian status wilayah atau geografis berdasarkan kedudukan ekonomi itu secara nyata menjadikan teori sistem dunia memiliki relevansi yang kuat dalam kajian geografi, khususnya geografi politik. Sepertimana dikemukakan oleh Taylor (2010: 38) argumentasi sistem dunia berpijak pada dimensi politis "keruangan" dalam mengklasifikasikan kedudukan suatu negara terkait penetrasi dan ketergantungannya pada sistem tersebut.

Proses dan Bentuk Eksploitasi

Menurut Wallerstein (1974), akar terbentuknya struktur hubungan ekonomi seperti itu bisa dilacak jauh ke belakang, semenjak lahirnya sistem ekonomi kapitalis dunia sekitar tahun 1500-an, yang kemudian secara perlahan bertransformasi melalui tahapan-tahapan krusial. Beliau menyampaikan bahwa ada empat periode dalam evolusi sistem kapitalis dunia, yakni: Bentuk asli (1450-1640), konsolidasi persaudagaran (1640-1815), ekspansi industri (1815-1917), dan dunia kapitalis kontemporer (1917-sekarang). Sistem ekonomi kapitalis dunia itu hakikatnya muncul pertama kali di Eropa Barat, dimulai dengan penemuan Amerika oleh Spanyol pada tahun 1492 dan diakhiri dengan perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mencetuskan konsep negara bangsa pada saat itu. Selama periode ini inti kekuatan ekonomi bergeser dari Mediterania lama ke Eropa Utara. Sebagai bagian dari pergeseran ini, pusat lama (Mediterania) menjadi

wilayah pinggiran atau semi pinggiran. Sementara bagian lain dari dunia yang secara ekonomi relevan pada waktu itu, yakni Amerika Latin dan Eropa Timur kemudian juga menjadi area pinggiran dalam sistem dunia.

Revolusi Perancis yang terjadi pada tahun 1789 menjadi tonggak penting bagi lahirnya sistem dunia. Revolusi tersebut mencetuskan gagasan liberalisme, yakni seperangkat nilai-nilai yang mengusung kesetaraan dan kebebasan individu dalam kehidupan umum, khususnya politik. Aspek terpenting dalam ideologi liberalisme ini adalah diakuiinya otoritas individu pada tingkatan yang melebihi masa-masa sebelumnya. Namun demikian nilai-nilai liberalisme barulah dapat diterapkan pada masyarakat Eropa, dan belum menyebar secara luas. Penyebaran nilai-nilai tersebut secara merata ke seluruh dunia hanyalah terjadi setelah kolonialisme Barat mengukuhkan atau menancapkan pengaruhnya secara merata di seluruh dunia pada akhir abad ke 19. Melalui kolonialisme bukannya pengaruh politik dan ideologi saja yang ditanamkan tetapi juga sistem ekonomi yang melekat di dalamnya. Keadaan ini menciptakan geokultur baru, yakni geokultur liberal ke seluruh dunia. Pada tahap ini, wilayah-wilayah di luar negara-negara Barat (penjajah) kemudian terintegrasi ke dalam sistem dunia, yakni sistem kapitalis.

Wilayah-wilayah pinggiran menjadi sumber pemasok bahan-bahan mentah yang murah dan sekaligus menjadi penopang ekonomi negara penjajahnya. Kondisi tersebut terus berlanjut sehingga abad ke 20, ketika negara-negara jajahan mengalami kemerdekaan. Meskipun setelah itu banyak negara-negara baru lahir dan berdaulat secara politik, namun secara keseluruhan mereka tidak bisa melepaskan ikatannya dengan sistem dunia yang sudah terbentuk dengan mapan itu. Bahkan belakangan dengan semakin majunya ekonomi dan pesatnya perkembangan sains dan teknologi, serta informasi, penetrasi sistem kapitalis itu semakin jauh menghunjam dan menyebar ke segala ceruk kehidupan masyarakat dalam bentuk lahirnya globalisasi. Dengan kata lain, globalisasi telah memperkuat kedudukan sistem dunia. Dalam konteks ini Wallerstein menolak dengan tegas pandangan dominan bahwa tata ekonomi dunia yang dicirikan oleh kapitalisme global merupakan produk pasca Perang Dunia II. Sistem dunia justru berkembang jauh sebelumnya, yakni 500 tahun yang lalu semenjak Eropa mengalami kebangkitan (Wallerstein 1984: 12-13).

Pandangan Wallerstein ini, untuk sebagian, kemudian memperoleh pembenaran dari para pakar sosiologi dan globalisasi yang kemudian mencetuskan pandangannya tentang tahapan-tahapan globalisasi yang memiliki akar jauh ke belakang seperti; Roland Robertson, Paul Kennedy, Paul Hirst, Grahame Thompson, Richard Falk, John Cavanagh, dan lain-lain. Dalam pandangan para teoritis ini, globalisasi bukanlah semata-mata merupakan wujud integrasi bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, dan modal saja, tetapi juga mengandung dimensi akumulasi kekayaan di tangan sekelompok negara-negara kaya dan juga perusahaan-perusahaan multinasional untuk terus melipatkan gandakan kekayaannya. Cakupan kegiatan politik ekonomi dan sosial menjadi mendunia dan interaksi antar negara dan masyarakat di banyak wilayah semakin meningkat. Pasar telah menjadi mekanisme terpenting yang menentukan hubungan-hubungan domestik maupun internasional (Gilpin & Gilpin 2002: 6).

Dengan demikian, globalisasi memberikan pijakan yang semakin kukuh bagi wujudnya sistem dunia modern dan berurat akarnya ideologi kapitalisme liberalisme. Negara-negara pusat melalui keunggulan yang dimilikinya di segala bidang dapat secara terus menerus mengukuhkan supremasinya tanpa harus menghadapi tantangan serius dari negara-negara pinggiran. Sementara negara-negara pinggiran akan secara terus menerus menjadi mangsa negara-negara maju, dan semakin jauh tertinggal di segala bidang. Kecepatan perubahan yang ditimbulkan oleh penetrasi teknologi modern menjadikan negara-negara berkembang semakin tidak berdaya. Dalam posisi seperti itu, memang tidak berarti negara-negara pinggiran tidak bisa melakukan pembangunan. Mereka bisa melakukan pembangunan itu, tetapi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan kemajuan yang diraih negara-negara di pusat. Meningkatnya kekuatan negara pusat terjadi melalui kolonialisme, di mana dengan cara ini mereka

dapat meningkatkan konsentrasi modal. Wallerstein melihat bahwa konsentrasi modal itu bukan hanya ada pada perusahaan tetapi juga pada skala dunia, yakni pada keseluruhan tata ekonomi kapitalis.

Wallerstein menyatakan bahwa terlalu sederhana jika kita membagi dunia yang kompleks ini hanya dari dwi kutub saja, mengingat banyak negara-negara yang secara faktual bukanlah tergolong negara pinggiran, tetapi juga bukan termasuk negara-negara maju atau pusat. Negara ini dikategorikan sebagai negara semi pinggiran. Negara-negara semi pinggiran adalah negara-negara yang memiliki kesempatan untuk melakukan lompatan pembangunan melalui strategi yang dijalankan, khususnya melalui campur tangan negara yang kuat. Sejumlah negara yang berhasil masuk dalam kategori semi pinggiran adalah seperti: Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, serta Singapura, yang selama beberapa dekade ini telah tumbuh menjadi kekuatan baru dalam formasi sistem kapitalis dunia. Pada jenis ini, negara semi pinggiran terjadi atau muncul karena proses meningkatnya posisi relatifnya. Negara itu berhasil melakukan transformasi secara besaran-besaran sehingga mampu beranjak menjadi negara yang maju dalam industri dan perdagangan sehingga menaikkan daya tawar terhadap negara-negara pusat. Negara-negara ini melakukan adaptasi yang dinamis terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi di pasar dunia dengan mengembangkan diversifikasi produk-produk industri secara sistematis. Mereka juga melepaskan sebagian ketergantungannya atas barang dari negara-negara maju.

Suatu negara dapat menjadi semi pinggiran karena proses kemerosotan, di mana negara-negara ini semula merupakan negara pusat, tetapi kemudian mengalami proses penurunan kapasitas produksi serta penurunan peran kekuasaan negara. Kemunduran ekonomi ini yang terkadang ditandai proses deindustrialisasi seringkali menyeret suatu negara jatuh ke dalam siklus pusaran semi pinggiran (Wallerstein 1984: 81). Hal itu seperti yang dialami oleh Portugis dan juga Spanyol, serta Polandia di abad 15 dan 16. Ketiga-tiga negara tersebut pernah mengalami tingkat kemajuan industri maupun perdagangan. Bahkan dua negara yang pertama, yakni Portugis dan Spanyol, mampu melakukan ekspansi ke sejumlah wilayah dunia, tetapi kemudian mengalami stagnasi dan kemunduran ekonomi.

Pandangan Wallerstein sistem dunia berkembang melalui kecenderungan sekulernya yang meliputi proses pencaplokan (*incorporation*), komersialisasi agraria, industrialisasi, dan proletarianisasi. Bersamaan dengan itu, sistem ekonomi dunia memiliki irama perputaran (*the cyclical rhythms*), yakni irama ekspansi dan stagnasi yang terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang dunia. Perputaran inilah yang secara berkali-kali terjadi, melalui krisis, sehingga menempatkan kedudukan suatu negara berada dalam posisi sentral, semi pinggiran, bahkan terlempar menjadi pinggiran (Wallerstein 1984: 13-26).

Cara Mengatasi

Menurut Wallerstein tatanan ini harus dilawan bersama oleh negara-negara berkembang melalui suatu gerakan antisistem berskala global dengan mengarahkan semua energi pada sumber-sumber surplus ekonomi. Sasarannya adalah agar penyedotan surplus ekonomi global secara besar-besaran dapat dihentikan dengan jalan mengurangi tingkat laba serta lebih memperhatikan pada persoalan pemerataan. Jadi berbeda dengan teori modernisasi dalam perspektif pembangunan, yang menyatakan bahwa hubungan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara berkembang bersifat saling menguntungkan, teori sistem dunia justru berpandangan sebaliknya, hubungan itu bersifat merugikan.

Melihat mekanisme bekerjanya sistem kapitalis yang demikian itu, maka mustahil bagi negara-negara pinggiran untuk dapat meraih kemajuan secara signifikan. Jikapun ada negara-negara yang berhasil melakukan pembangunan dan bertransformasi menjadi negara semi pinggiran maka biaya keberhasilan itu akan menjadi beban yang harus ditanggung oleh negara-negara lain di kawasan lain yang gagal melakukan upaya pembangunan. Kenyataan ini sungguh paradoks bahwa keberhasilan satu negara justru akan membenamkan negara lain. Dengan demikian pembangunan sebagai cita-cita nasional seringkali bukan membawa efek yang positif tetapi juga merusak. Pembangunan ibarat suatu teka-teki di

mana tidak semua orang akan mendapat bagiannya secara setara. Alih-alih negara pinggiran dapat menaikkan statusnya ke posisi semi pinggiran, malah banyak negara-negara semi pinggiran sendiri yang terlempar statusnya dari semi pinggiran ke posisi pinggiran. Dalam konteks tata pembangunan dunia, akhirnya persamaan hukum dan kemerdekaan politik atau apapun yang disebut sebagai “negara yuridis” tidak lebih dari basa basi yang sopan yang hanya mengaburkan kerentanan yang ekstrim atas negara-negara berkembang yang miskin dan didominasi serta dieksploitasi oleh negara-negara kapitalis yang kaya (Jackson & Sorensen 2005: 24).

Karena itu, usaha untuk mewujudkan tata pembangunan dunia yang berkeadilan sampai kapanpun mustahil diwujudkan jika proses eksploitasi masih terus dilakukan. Selama puluhan tahun, bahkan dalam beberapa kasus ratusan tahun, metropolis beruntung telah dapat mengeruk hasil sumberdaya dari wilayah pinggiran. Selain itu, metropolis berhasil menjamin kesinambungan pengerukan hasil-hasil tersebut dengan jalan spesialisasi yang sangat ekstrem dan penataan wilayah pinggiran secara struktural sesuai dengan orientasi kebutuhan pusat. Hal ini memperluas jangkauan proses historis integrasi wilayah terbelakang seperti: Amerika Latin, Asia, serta Afrika, ke pasar dunia yang kapitalistik.

Dalam kaitan ini, Wallerstein menyarankan adanya suatu gerakan perjuangan kelas berskala global, di mana negara-negara pinggiran bersatu padu dapat mengurangi tingkat laba yang disedot oleh negara-negara metropolis, sehingga mengurangi surplus ekonomi yang selama ini dinikmati oleh negara-negara pusat. Contoh yang paling kentara adalah bagaimana negara-negara pinggiran punya kebijakan yang ketat terhadap eksploitasi sumberdaya alam. Salah satunya adalah dengan melakukan “moratorium” ataupun pengendalian ekspor sumberdaya mineral mentah ke metropolis, sebelum diproses menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Tindakan ini dapat mengerem aliran surplus ke metropolis. Dengan “penahanan surplus laba” diharapkan negara-negara kapitalis tidak lagi memiliki kekuatan yang dahsyat seperti pada masa-masa sebelumnya, mengingat ekonomi kapitalis dunia ini tidak mungkin dapat melakukan ekspansinya secara geografis dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme sepertimana pada masa-masa sebelumnya

KESIMPULAN

Tesis utama teori sistem dunia menyatakan bahwa dunia moderen hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu *division of labor* tunggal dan sistem budaya jamak yang membentuk suatu hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah berhenti. Secara hierarkis wilayah dunia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni: Wilayah “pusat” (*center*) yang maju dan dominan; “semi pinggiran” (*semi periphery*) yang setengah maju. dan “pinggiran” (*periphery*) yang tergantung dan terbelakang. Dalam pandangan Wallerstein, wilayah pusat adalah negara-negara atau kota-kota utama dunia yang selama ini menjadi pusat-pusat bisnis, keuangan, teknologi, dan perdagangan internasional, yang mengendalikan seluruh rangkaian denyut perekonomian yang berlandaskan sistem kapitalis.

Wilayah semi pinggiran, adalah negara-negara, yang sudah memiliki tingkat kemajuan tertentu tetapi belum sepenuhnya dapat melepaskan ketergantungannya pada wilayah metropolis. Sementara wilayah pinggiran adalah negara-negara yang memiliki status ekonomi terbelakang, memiliki tingkat kemiskinan yang cukup besar, kualitas sumberdaya manusia yang rendah, tata pemerintahan yang buruk serta tatanan sosial yang rapuh. Negara-negara ini merupakan pemasok bahan mentah untuk keperluan industri, sekaligus tempat pemasaran produk-produk industri negara-negara maju.

Dalam mata rantai perdagangan ekonomi dunia, negara-negara pinggiran senantiasa bergantung kepada negara-negara maju, dan mereka tidak bisa lepas dari sistem yang ada. Hubungan antara “pusat” dan “pinggiran” bercorak eksploitatif, yang ditandai adanya aliran surplus ke negara-negara “pusat”. Teoritis sistem dunia berdalil bahwa, kemajuan-kemajuan yang dicapai di wilayah-wilayah pusat secara bersamaan justru menciptakan kemiskinan serta ketimpangan di negara-negara pinggiran.

Wallerstein menyarankan adanya suatu gerakan perjuangan kelas berskala global, di mana negara-negara pinggiran bersatu padu dapat mengurangi tingkat laba yang disedot oleh negara-negara metropolis, sehingga mengurangi surplus ekonomi yang selama ini dinikmati oleh negara-negara pusat. Contoh yang paling kentara adalah bagaimana negara-negara pinggiran punya kebijakan yang ketat terhadap eksploitasi sumberdaya alam. Salah satunya adalah dengan melakukan “moratorium” ataupun pengendalian ekspor sumberdaya mineral mentah ke metropolis, sebelum diproses menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Brown, Christ, *Understanding International Relations*, Second Edition, New York: PALGRAVE, 2011
- Frieden, Jeffrey A. and Lake, David A., *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, New York: St. Martin Press, 2009.
- Gilpin, Robert & Gilpin, Jean Millis, *Tantangan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke-21*, Terj. Haris Munandar & Dudy Priatna, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Terj. Dadan Suryadipura, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Keohane, Robert O., “The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes” in Ole Holsti, (eds.), *Change in the International System*, New York: West View, 1988.
- Muir, Richard, *Political Geography: A New Introduction*, London: MACMILLAN PRESS LTD., 2012.
- Senghaas, Dieter, *Tata Ekonomi Dunia dan Politik Pembangunan: Pledoi Untuk Disosiasi*, Terj. Aan Effendi, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Taylor, P.J., *Political Geography: World Economy, Nation State and Locality*, Harlow: Longman, 2010.
- Wallerstein, Immanuel, *The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century*, New York: Academic Press, 1974.
- Wallerstein, Immanuel, *The Politics of the Capitalist World-Economy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Wallerstein, Immanuel, “World Sytem Analysis”, dalam Anthony Giddens and Jonathan Turner (eds.), *Social Theory Today*, Stanford: Stanford University Pers, 1987.
- Wallerstein, Immanuel, *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigm*, Oxford: Polity Press, 1991.